

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemisahan fungsi antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian dalam hubungan keagenan sering menyebabkan terjadinya berbagai masalah keagenan. Masalah tersebut dikarenakan adanya suatu konflik dan perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan selaku pihak pemberi wewenang (*principal*) dengan manajer perusahaan selaku pihak penerima wewenang (*agent*). Berawal dari inilah penyebab munculnya konflik agensi dalam suatu perusahaan (Jensen dan Meckling (1976) dalam Isditanadevi dan Puspaningsih (2014)).

Sistem pengawasan merupakan suatu sistem yang berguna untuk mencegah terjadinya masalah keagenan, yaitu masalah yang terjadi diantara pihak *agent* yang menjalankan operasional perusahaan dengan pemegang saham (*ownership*) yang merupakan pemilik perusahaan. Sistem pengawasan ini disebut dengan nama *corporate governance* (Isditanadevi dan Puspaningsih, 2014). *Corporate governance* adalah cara yang digunakan untuk memberikan kepercayaan kepada para pemasok dana perusahaan yang akan memperoleh pengembalian (*return*) atas investasi mereka. Selain itu, *corporate governance* adalah suatu sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Menurut Rezaee (2009: 25) dalam Rompas, dkk., (2014) fungsi *corporate governance* digambarkan sebagai alat yang

berguna untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham demi menghindari masalah dari berbagai benturan kepentingan.

Corporate governance mulai menjadi perhatian sejak terjadinya skandal-skandal bisnis yang merupakan suatu indikasi mengenai lemahnya *corporate governance* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Inggris sekitar tahun 1950 yang kemudian berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga menimbulkan resesi pada tahun 1980 (Davies (1999) dalam Darmawati (2006)). Di Indonesia, *corporate governance* mulai diperhatikan sejak terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ini terjadi karena lemahnya *corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga memperlambat proses perbaikan krisis ekonomi. Pemerintah maupun investor mulai terdorong untuk memberikan perhatian khusus dalam praktik *corporate governance* dengan menyusun peraturan ataupun standar *corporate governance*. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan masalah penyelewengan, dan yang paling penting adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (Taman dan Nugroho, 2011).

Sebagian besar negara terutama negara Indonesia telah mendirikan suatu badan atau institusi yang mempunyai tugas untuk membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* sesuai dengan kondisi bisnis dalam setiap negara. Bank dunia dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah berkontribusi dalam mengembangkan prinsip-prinsip *corporate governance* di berbagai negara. Bahkan pemeringkatan

implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan juga telah dilakukan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pemeringkatan implementasi *corporate governance* bagi perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah dilakukan setiap tahun sejak tahun 2001 oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Pemeringkatan yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan nama *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) bertujuan untuk menilai seberapa baik penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Darmawati, 2006).

Keberadaan sepuluh besar perusahaan yang termasuk dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan perusahaan yang mempunyai kualitas implementasi *corporate governance* terbaik di Indonesia. Tentunya, perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi daya tarik sendiri bagi para investor dan kreditor. Kualitas implementasi *corporate governance* yang baik mampu meningkatkan kemajuan bagi suatu perusahaan melalui peningkatan kinerja dan peningkatan kesehatan perusahaan yang semakin membaik. Selain itu, *corporate governance* dapat menjamin suatu perusahaan yang sedang dalam keadaan terpelihara (*sustainable*) dari kondisi bisnis yang tidak sehat. Dengan demikian, peningkatan mengenai kualitas implementasi *corporate governance* yang semakin membaik dapat menghilangkan kecurigaan dari pihak lain (Swa Sembada (2009: 89-104) dalam Taman dan Nugroho (2011)).

Terdapat beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Faktor pertama adalah kesempatan investasi, yaitu nilai dari suatu perusahaan yang besar atau kecilnya tergantung dari pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan oleh pihak manajemen di masa mendatang. Perusahaan akan berusaha melakukan ekspansi dalam strategi bisnis apabila memiliki kesempatan investasi yang tinggi, sehingga akan lebih membutuhkan dana dari pihak eksternal (Durnev dan Kim, 2003). Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance* yang lebih baik berdasarkan kesempatan investasi yang ada. Penelitian yang telah dilakukan oleh Meitha dan Tuzahro (2009) menunjukkan bahwa kesempatan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas *corporate governance*. Berbeda dengan penelitian Rahayuningsih (2013) yang menyatakan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Faktor kedua adalah penjualan, yaitu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan, yaitu memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Penjualan yang dilakukan juga harus didukung dengan harta ataupun *asset* yang dimiliki, sehingga perusahaan akan memanfaatkan *asset* tetap yang telah ditanamkan untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan Meitha dan Tuzahro (2009) menunjukkan bahwa penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate*

governance. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) menunjukkan bahwa penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Faktor ketiga adalah ukuran perusahaan, yaitu suatu skala besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan total *asset*, nilai saham, *log size*, dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam tiga variabel yaitu, total *asset*, penjualan dan kapitaliasi pasar. Ketiga variabel tersebut berfungsi untuk menentukan ukuran perusahaan, dikarenakan sudah dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Faktor keempat adalah *leverage*, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap modal ataupun *asset* perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang tinggi dalam struktur modal yang dimilikinya, cenderung diawasi oleh pihak eksternal (kreditor) karena perjanjian kontrak utang yang telah dibuat (Black, dkk., 2006). Sehingga dengan adanya pengawasan dari pihak eksternal

(kreditor) tersebut, maka perusahaan akan lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Hormati (2009) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Taman dan Nugroho (2011) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Faktor kelima adalah profitabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau *profit*. Profitabilitas merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengungkapan, terutama mengenai informasi keuangan. Semakin besar profitabilitas cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi demi kelangsungan usaha perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Zulaikha (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Faktor keenam adalah umur *listing*, yaitu seberapa lama saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan memiliki kualitas *corporate governance* yang baik apabila memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan umur *listing* yang lebih lama. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, dkk., (2011)

menunjukkan bahwa umur *listing* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) menunjukkan bahwa umur *listing* tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) dengan menggabungkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya mengenai kualitas implementasi *corporate governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun dan variabel penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan tahun 2010 sampai dengan 2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2011 sampai dengan 2014. Penelitian ini menghilangkan dua variabel bebas yang terdapat pada penelitian sebelumnya, hal ini dikarenakan kedua variabel bebas tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kemudian pada penelitian ini menambahkan dua variabel lain yaitu profitabilitas dan umur *listing*. Penambahan dua variabel tersebut berasal dari penelitian Hikmah, dkk., (2011) dan Isditanadevi dan Puspaningsih (2014).

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian terdahulu, dan hasil penelitian yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas implementasi *corporate governance* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2011 sampai dengan 2014. Oleh karena itu, penelitian

dengan judul “**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Implementasi Corporate Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)**” dianggap penting untuk dilakukan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* diantaranya yaitu: kesempatan investasi, penjualan, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan umur *listing*. Keenam variabel tersebut diduga memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
2. Apakah penjualan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?

5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?
6. Apakah umur *listing* berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai kesempatan investasi terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai penjualan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai ukuran perusahaan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai *leverage* terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai profitabilitas terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
6. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai umur *listing* terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar referensi ilmiah di bidang ekonomi khususnya akuntansi mengenai kualitas implementasi *corporate governance*.

2. Bidang Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi bagi perusahaan, sehingga dengan informasi tersebut dapat membantu manajer dalam membuat kebijakan dan memperbaiki kualitas implementasi *corporate governance*. Bagi investor diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengambilan keputusan atas investasi dan untuk meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan. Bagi kreditur diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pelepasan modal atau hutang kepada perusahaan.